



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat

LAPORAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SEMESTER I TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Analisis Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 terhadap Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan merupakan salah satu tugas Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja semester I yang disusun berdasarkan target dan realisasi serta rencana Aksi dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai merupakan dasar evaluasi yang dilaksanakan secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi yang telah disusun dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai.

Penyusunan laporan analisis semester I merupakan salah satu dasar dalam menilai penerapan dan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Analisis Capaian Kinerja Semester I tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada semester selanjutnya, sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

Padang, Juli 2023

KEPALA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Ir. KUARTINI DETI PUTRI, MSi
NIP. 19691113 199303 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan	2
1.3.Dasar Hukum	3
BAB. II. KONDISI EXISTING SERAPAN ANGGARAN S/D SEMESTER	
2.1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5
2.2. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan..	10
2.3. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Administrasi Umum	10
BAB. III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	
3.1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23
3.2. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan..	25
3.3. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Administrasi Umum	27
BAB. IV. ANALISA CAPAIAN KINERJA	
4.1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33
4.2. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan..	33
4.3. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Administrasi Umum	34
BAB. V. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	35
BAB. VI. PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan OPD di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi s.d 30 Juni 2023.....	6
2. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dan Realisasi di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	10
3. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan OPD di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi s.d 30 Juni 2023.....	11
4. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dengan Realisasi di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan	16
5. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan OPD di Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023	17
6. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dengan Realisasi di Lingkup Asisten Adminsitasi Umum	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	6
2. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	7
3. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	8
4. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	9
5. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023	12
6. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	12
7. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	14
8. Grafik Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra Kondisi 30 Juni 2023	14
9. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023	18
10. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023	18
11. Grafik Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023	20
12. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023	20

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 yang diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada pasal Pasal 72 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- c. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan

- dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pada pasal 81 dijelaskan pada salah satu bagian yakni Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bertugas : melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan fungsi tersebut terkait dengan Analisis Capaian Kinerja yang akan menjadi evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pelaksanaan program/kegiatan maka perlu disusun Laporan

Analisis Capaian Kinerja yang dirangkum dari laporan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah melalui SBE berbasis eviden (Simbangda) setiap bulan dan dibahas secara berkala dalam rapat bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Hal ini merupakan bentuk pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan terhadap kinerja Kepala organisasi perangkat daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Semester 1 tahun 2023 dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada semester 1, yang merupakan salah satu implementasi penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kepada Pimpinan terkait pencapaian target dan realisasi program kerja perangkat provinsi Sumatera Barat beserta analisa terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut serta mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembantukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Sasaran Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II.

KONDISI EXISTING SERAPAN ANGGARAN S/D SEMESTER 1

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Bab IV Pelaksanaan Koordinasi Kerja, pada Peraturan tersebut juga diatur Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup masing-masing Koordinasi Kerja Asisten tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

2.1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

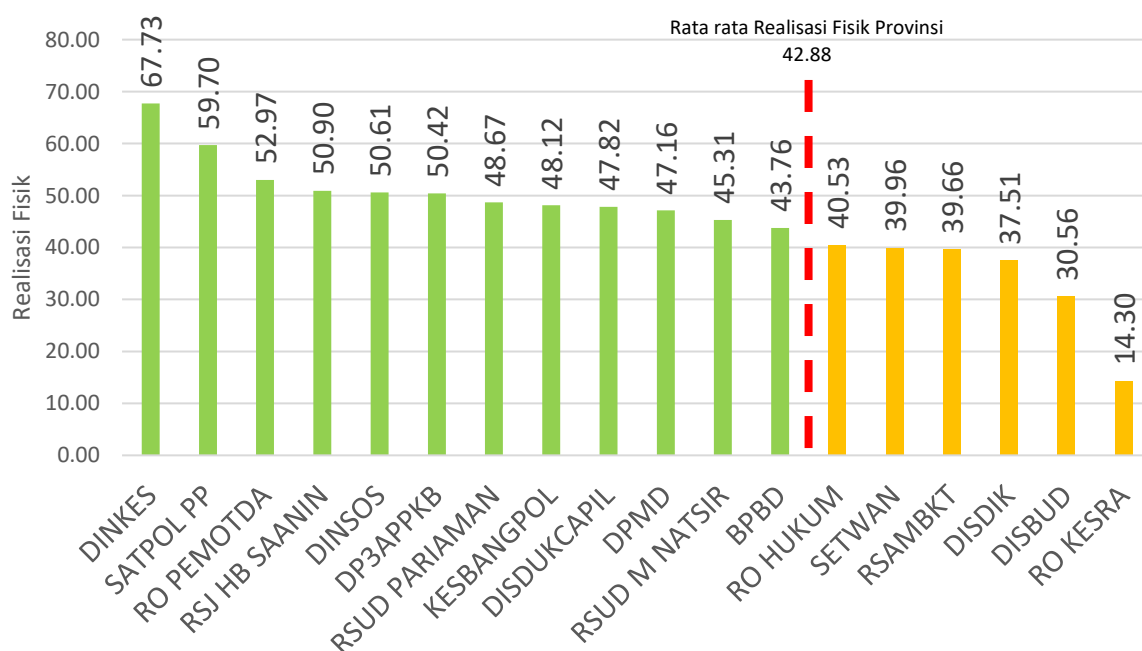
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan dan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, yang terdiri dari 18 perangkat daerah.

Kondisi realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada semester 1 (Januari-Juni) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

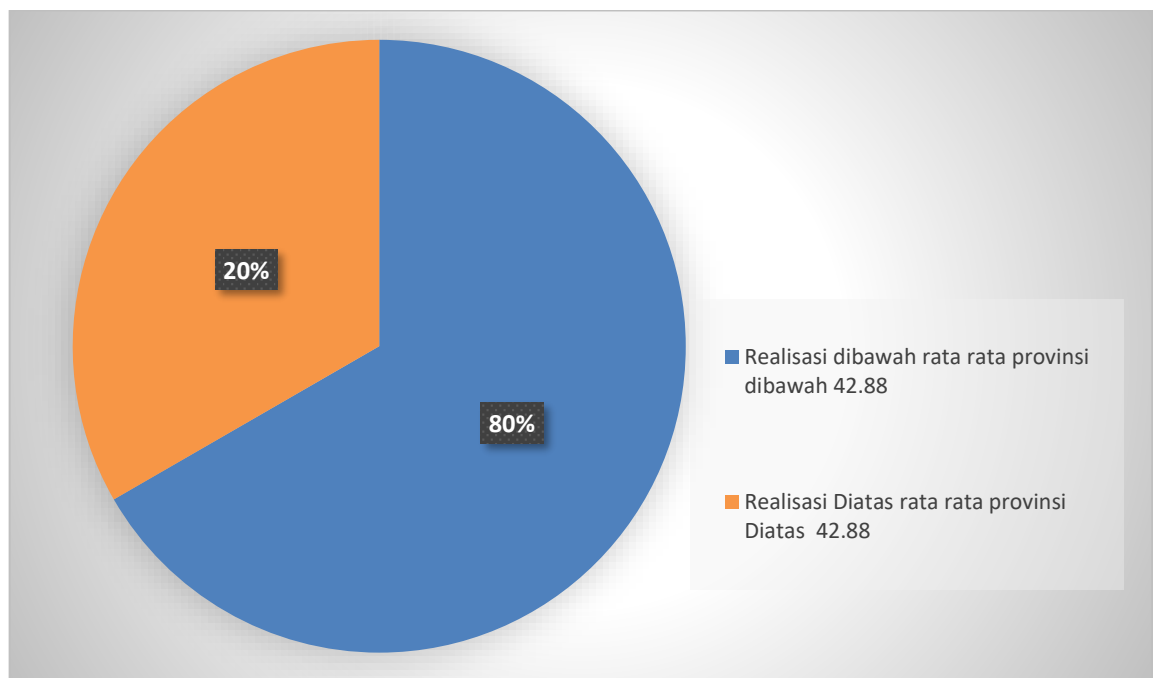
Tabel 1. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kondisi 30 Juni 2023.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Fisik			Keuangan		
	T	R	D	T	R	D
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49.13	48.12	-1.01	41.18	37.26	-3.92
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52.76	43.76	-9.00	46.26	37.10	-9.16
BIRO HUKUM	66.70	40.53	-26.17	65.86	27.70	-38.16
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	38.08	14.30	-23.78	35.36	23.36	-12.00
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	55.27	52.97	-2.30	55.26	54.56	-0.70
DINAS KEBUDAYAAN	33.92	30.56	-3.36	33.19	30.49	-2.70
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	59.39	47.82	-11.57	56.66	45.83	-10.83
DINAS KESEHATAN	71.75	67.73	-4.02	48.94	45.15	-3.79
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	60.88	47.16	-13.72	59.58	48.37	-11.21
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	53.18	50.42	-2.76	40.23	36.62	-3.61
DINAS PENDIDIKAN	41.26	37.51	-3.75	39.89	37.36	-2.53
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.99	59.70	0.71	58.98	55.70	-3.28
DINAS SOSIAL	58.22	50.61	-7.61	53.86	47.14	-6.72
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	52.09	50.90	-1.19	47.75	51.12	3.37
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	43.86	39.96	-3.90	35.16	28.98	-6.18
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	44.03	45.31	1.28	41.95	36.73	-5.22
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	52.49	48.67	-3.82	48.45	42.30	-6.15
SEKRETARIAT DPRD	47.33	39.66	-7.67	47.13	36.27	-10.86
Rata - rata	52.19	45.32	-6.87	41.39	37.44	-3.95

Gambar 1. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 2. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kondisi 30 Juni 2023



Capain realisasi fisik OPD lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra yang berada diatas rata-rata provinsi (42,88%) adalah 12 (dua belas) OPD, sedangkan realisasi yang berada di bawah rata-rata provinsi ada 6 (enam) OPD dengan keterangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Keterangan :

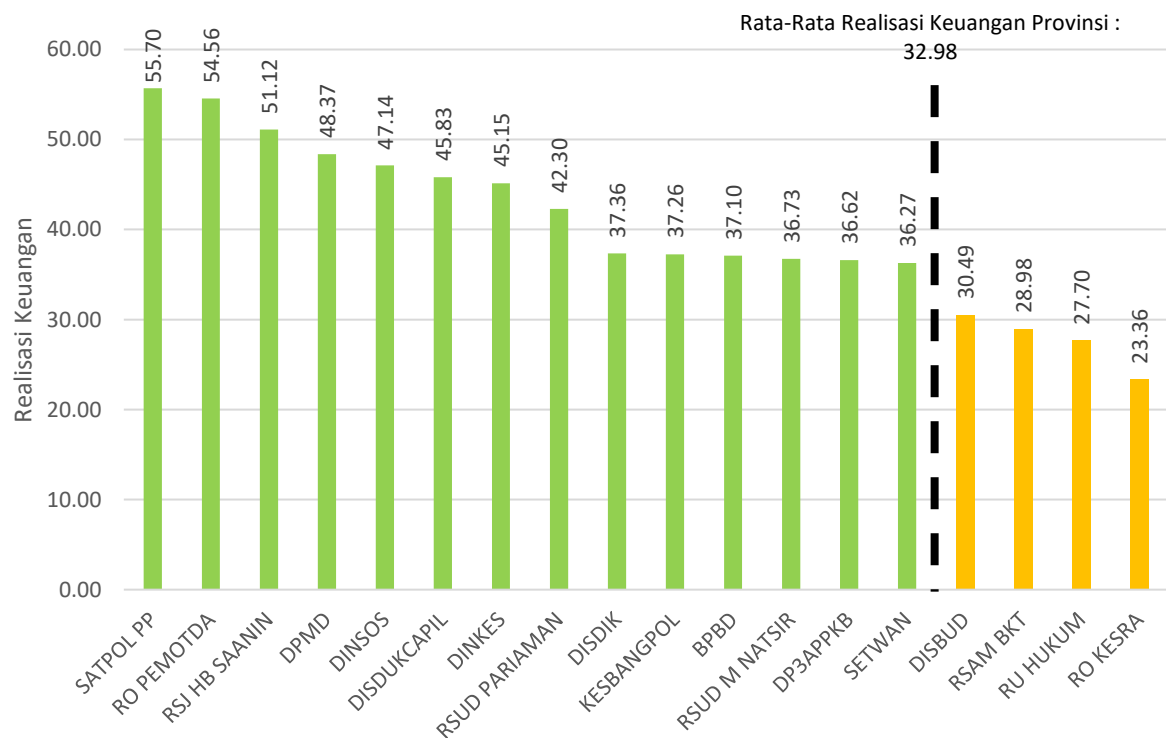
Data OPD Diatas rata rata provinsi : 42.88

No	OPD	Realisasi
1	DINKES	67,73
2	SATPOL PP	59,70
3	RO PEMOTDA	52,97
4	RSJ HB SAANIN	50,90
5	DINSOS	50,61
6	DP3APPKB	50,42
7	RSUD PARIAMAN	48,67
8	KESBANGPOL	48,12
9	DISDUKCAPIL	47,82
10	DPMD	47,16
11	RSUD M NATSIR	45,31
12	BPBD	43,76

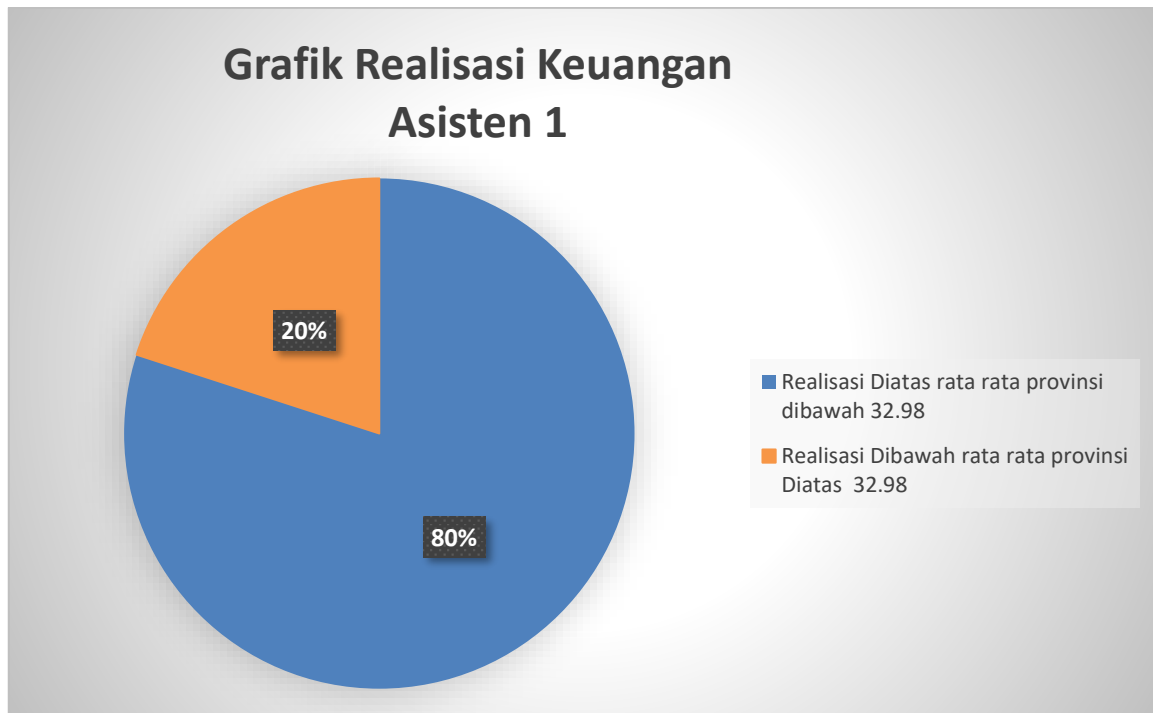
Data OPD dibawah rata rata provinsi : 42.88

No	OPD	REALISASI
1	RO HUKUM	40,53
2	RSAM BKT	39,96
3	SETWAN	39,66
4	DISDIK	37,51
5	DISBUD	30,56
6	RO KESRA	14,30

Gambar 3. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 4. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kondisi 30 Juni 2023



Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian realisasi keuangan di 16 OPD sudah berada diatas rata-rata capaian provinsi (32,98%) sedangkan 4 OPD masih berada dibawah capaian provinsi yaitu : Dinas Kebudayaan, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dengan Realisasi

NO	URAIAN	KONSISTEN	KURANG KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
1	REALISASI FISIK	1. BADAN KESBANGPOL 2. BIRO PEM DAN OTDA 3. DINAS KEBUDAYAAN 4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN 6. DINAS PENDIDIKAN 7. RSJ. HB SAANIN 8. RSAM 9. RSUD PARIAMAN	10. BPBD 11. DINAS SOSIAL 12. SEKRETARIAT DPRD	13. BIRO HUKUM 14. BIRO KESRA 15. DINAS DUKCAPIL 16. DINAS PMD 17. DINAS SATPLOL PP (SURPLUS) 18. RSUD M. NATSIR (SURPLUS)
2	REALISASI KEUANGAN	1. BADAN KESBANGPOL 2. BIRO PEM DAN OTDA 3. DINAS KEBUDAYAAN 4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN 6. DINAS PENDIDIKAN 7. DINAS SATPOL PP	8. BPBD 9. DINAS SOSIAL 10. RSAM 11. RSUDM. NATSIR 12. RSUD PARIAMAN	13. BIRO HUKUM 14. BIRO KESRA 15. DINAS DUKCAPIL 16. DINAS PMD 17. RSJ. HB SAANIN (SURPLUS) 18. SEKRETARIAT DPRD

2.2. Organisasi Pernagkat Daerah di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, penataan wilayah, pengelolaan sumber daya air, perumahan rakyat, pertanahan, pengendalian lingkungan, ketahanan pangan, koperasi usaha kecil dan menengah, kelautan perikanan, pertanian, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, perhubungan, kepariwisataan, transmigrasi, ketenagakerjaan, dan badan usaha milik daerah.

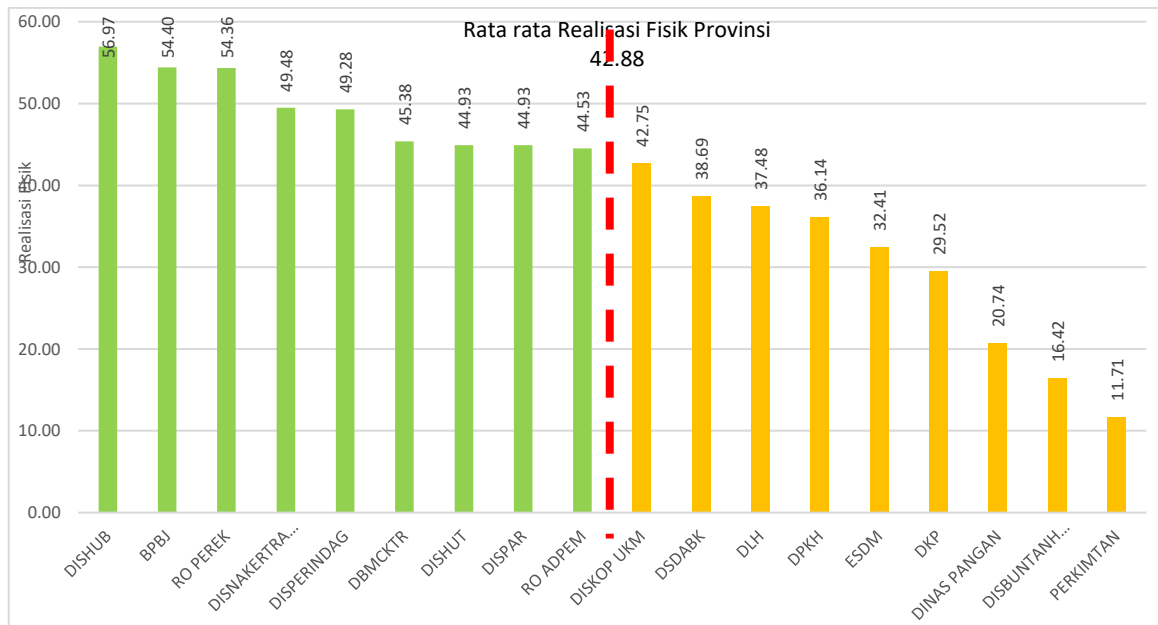
Kondisi realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada semester 1 (Januari-Juni) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023.

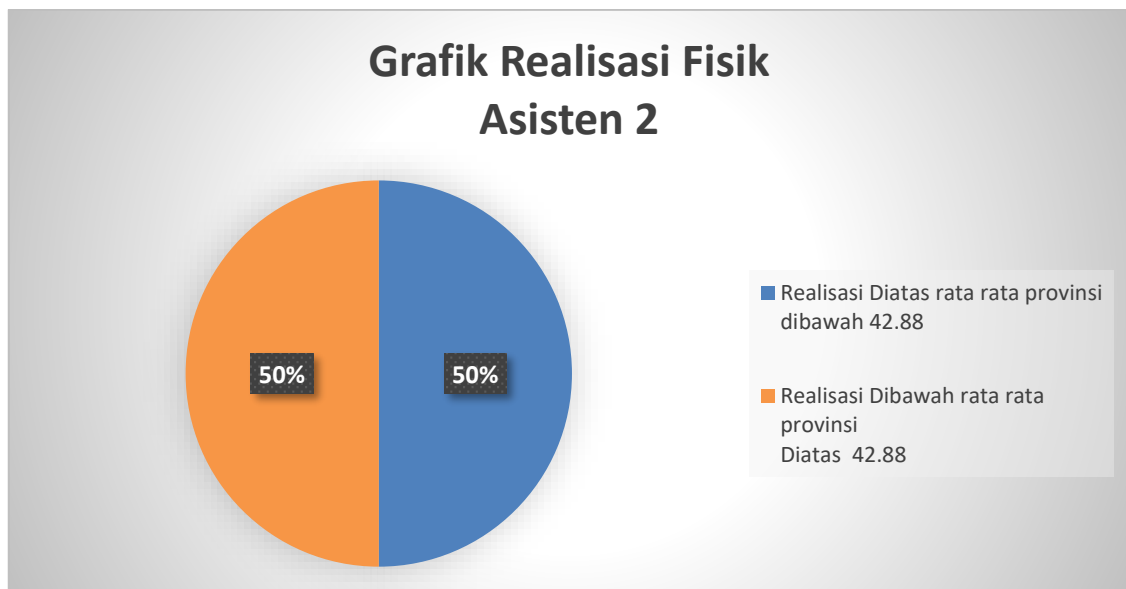
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Fisik			Keuangan		
	T	R	D	T	R	D
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	47.48	44.53	-2.95	45.49	32.96	-12.53
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	69.60	54.40	-15.20	68.33	48.31	-20.02
BIRO PEREKONOMIAN	53.36	54.36	1.00	45.52	32.80	-12.72
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	46.83	45.38	-1.45	57.00	29.51	-27.49
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	34.87	32.41	-2.46	22.32	17.90	-4.42
DINAS KEHUTANAN	67.72	44.93	-22.79	64.84	42.29	-22.55
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	37.63	29.52	-8.11	36.96	21.79	-15.17
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	43.96	42.75	-1.21	42.26	34.36	-7.90
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46.29	37.48	-8.81	46.54	36.14	-10.40
DINAS PANGAN	27.92	20.74	-7.18	27.45	18.35	-9.10
DINAS PARIWISATA	52.59	44.93	-7.66	52.02	36.18	-15.84
DINAS PERHUBUNGAN	64.19	56.97	-7.22	63.65	55.03	-8.62
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	48.65	49.28	0.63	48.02	43.13	-4.89
DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	21.78	16.42	-5.36	17.09	15.61	-1.48
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20.31	11.71	-8.60	8.69	6.20	-2.49
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	66.09	36.14	-29.95	66.03	34.09	-31.94
DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	49.48	38.69	-10.79	62.21	40.05	-22.16
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.11	49.48	-1.63	50.92	44.36	-6.56
Rata - rata	47.21	39.45	-7.76	43.32	27.5	-15.82

NO	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	KET	RATA-RATA REALISASI PROVINSI (%)	KET
1	FISIK	47,21	39,45	-7,76	KONSISTEN	42,88	DIBAWAH RATA-RATA CAPAIAN PROVINSI
2	KEUANGAN	43,32	27,50	-15,82	TIDAK KONSISTEN	32,98	DIBAWAH RATA-RATA CAPAIAN PROVINSI

Gambar 5. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 6. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023



Capain realisasi fisik OPD lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berada diatas rata-rata provinsi (42,88%) adalah 9 (sembilan) OPD, sedangkan realisasi yang berada di bawah rata-rata provinsi ada 9 (sembilan) OPD dengan keterangan sebagaimana tabel dibawah ini

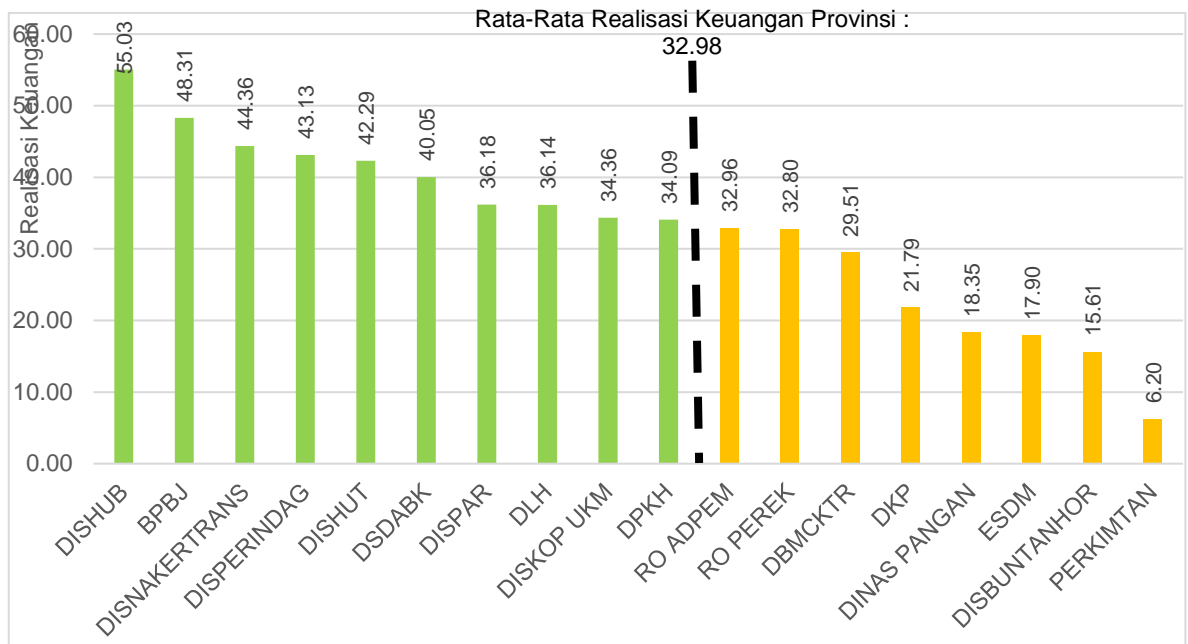
Keterangan : Data OPD Diatas rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	DISHUB	55,03
2	BPBJ	48,31
3	DISNAKERTRANS	44,36
4	DISPERINDAG	43,13
5	DISHUT	42,29
6	DSDABK	40,05
7	DISPAR	36,18
8	DLH	36,14
9	DISKOP UKM	34,36
10	DPKH	34,09

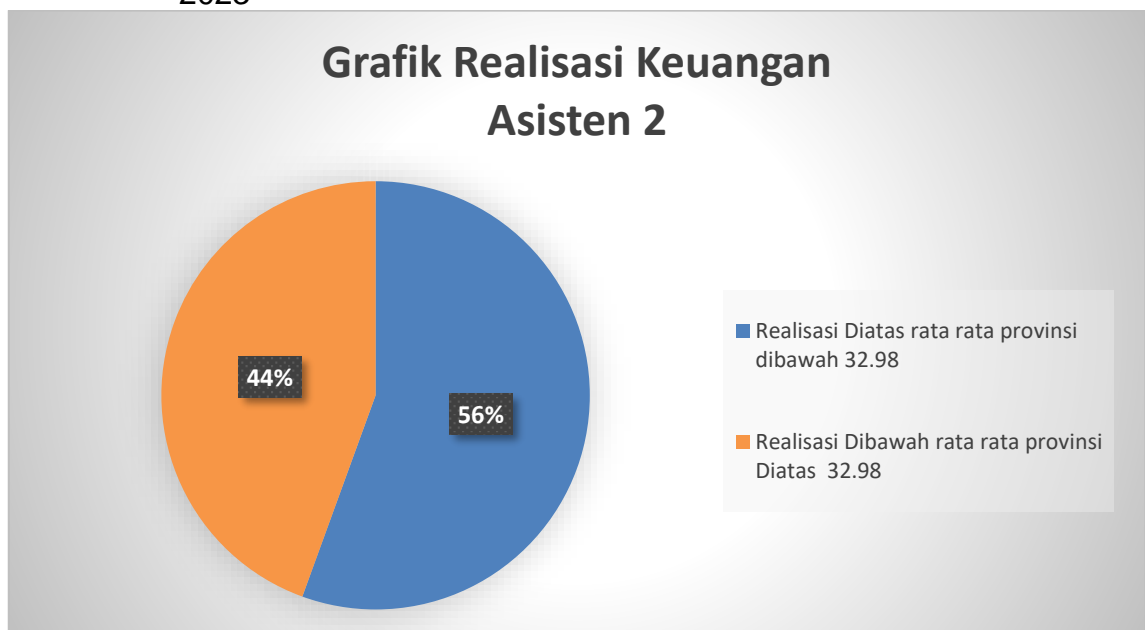
Data OPD dibawah rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	RO ADPEM	32,96
2	RO PEREK	32,80
3	DBMCKTR	29,51
4	DKP	21,79
5	DINAS PANGAN	18,35
6	ESDM	17,90
7	DISBUNTANHOR	15,61
8	PERKIMTAN	6,20

Gambar 7. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 8. Grafik Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kondisi 30 Juni 2023



Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian realisasi keuangan di 16 OPD sudah berada diatas rata-rata capaian provinsi (32,98%) sedangkan 10 (sepuluh) OPD masih berada dibawah capaian provinsi 8 (delapan) OPD dengan rincian sebagai berikut :

Data OPD Diatas rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	DISHUB	55,03
2	BPBJ	48,31
3	DISNAKERTRANS	44,36
4	DISPERINDAG	43,13
5	DISHUT	42,29
6	DSDABK	40,05
7	DISPAR	36,18
8	DLH	36,14
9	DISKOP UKM	34,36
10	DPKH	34,09

Data OPD dibawah rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	RO ADPEM	32,96
2	RO PEREK	32,80
3	DBMCKTR	29,51
4	DKP	21,79
5	DINAS PANGAN	18,35
6	ESDM	17,90
7	DISBUNTANHOR	15,61
8	PERKIMTAN	6,20

Tabel 4. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dengan Realisasi di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

NO	URAIAN	KONSISTEN	KURANG KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
1	REALISASI FISIK	1.DINAS BMCKTR 2.DISNAKERTRANS 3.DINAS ESDM 4.DINAS KOPERASI UKM 5.BIRO ADM PEMBANGUNAN	6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8. DINAS PANGAN 9. DINAS PARIWISATA 10. DINAS PERHUBUNGAN 11. DINAS PERKEBUNAN TAHOR 12. DINAS PERKIMTAN	13.BIRO PEREKONOMIAN (SURPLUS) 14.DINAS PERINDAG (SURPLUS) 15.BIRO PENGADAAN BJ 16.DINAS KEHUTANAN 17.DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 18.DINAS SDA & BK
2	REALISASI KEUANGAN	1. DINAS ESDM 2. DINAS PERINDAG 3. DINAS PERKEBUNAN TAHOR 4. DINAS PERKIMTAN	5. DINAS KOPERASI UKM 6. DINAS PANGAN 7. DINAS PERHUBUNGAN 8. DISNAKERTRANS	9. BIRO ADM PEMBANGUNAN 10. BIRO PENGADAAN BJ 11. BIRO PEREKONOMIAN 12. DINAS BMCKTR 13. DINAS KEHUTANAN 14. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16. DINAS PARIWISATA 17. DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 18. DINAS SDA & BK

2.3. Organisasi Lingkup Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi perangkat daerah, tata administrasi, pelayanan pimpinan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, keuangan daerah, pendapatan daerah, perencanaan daerah, pengembangan sumber daya manusia, kepegawaian, komunikasi dan informatika, kearsipan dan perpustakaan, penanaman modal dan investasi, kepemudaan dan olahraga.

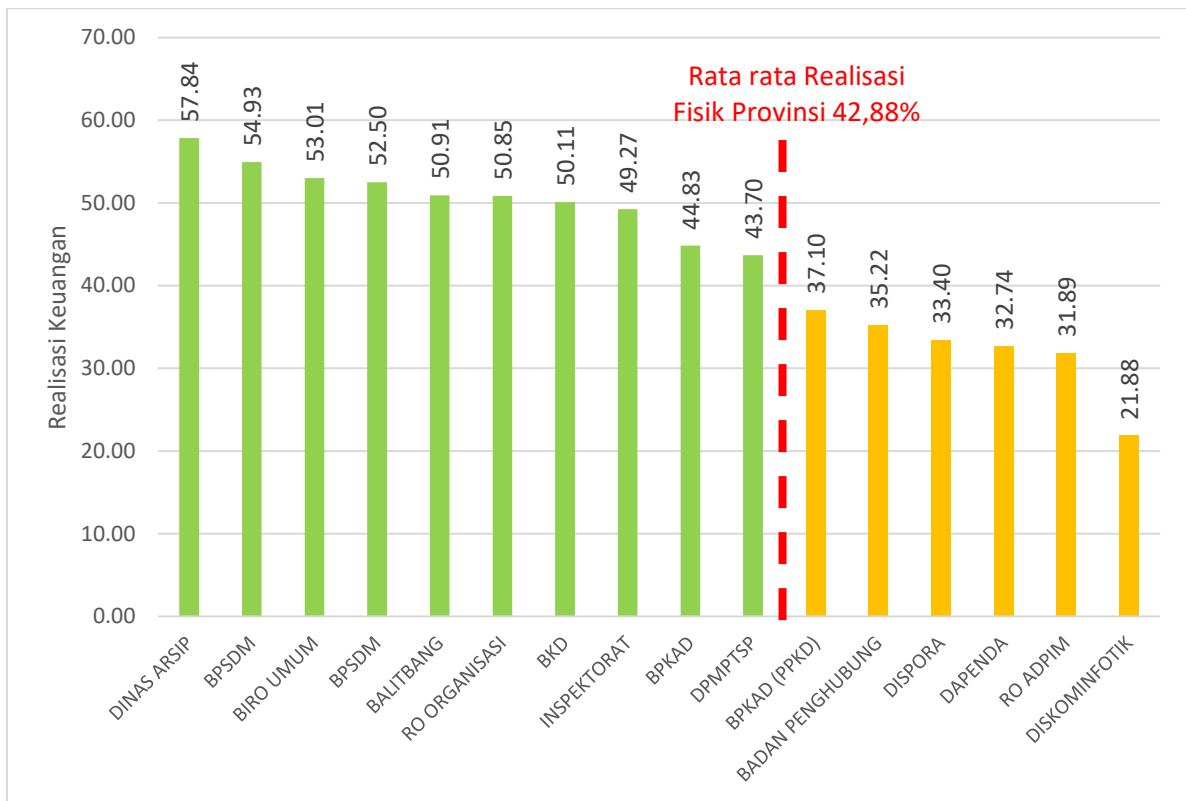
Kondisi realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada semester 1 (Januari-Juni) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5. Akumulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023.

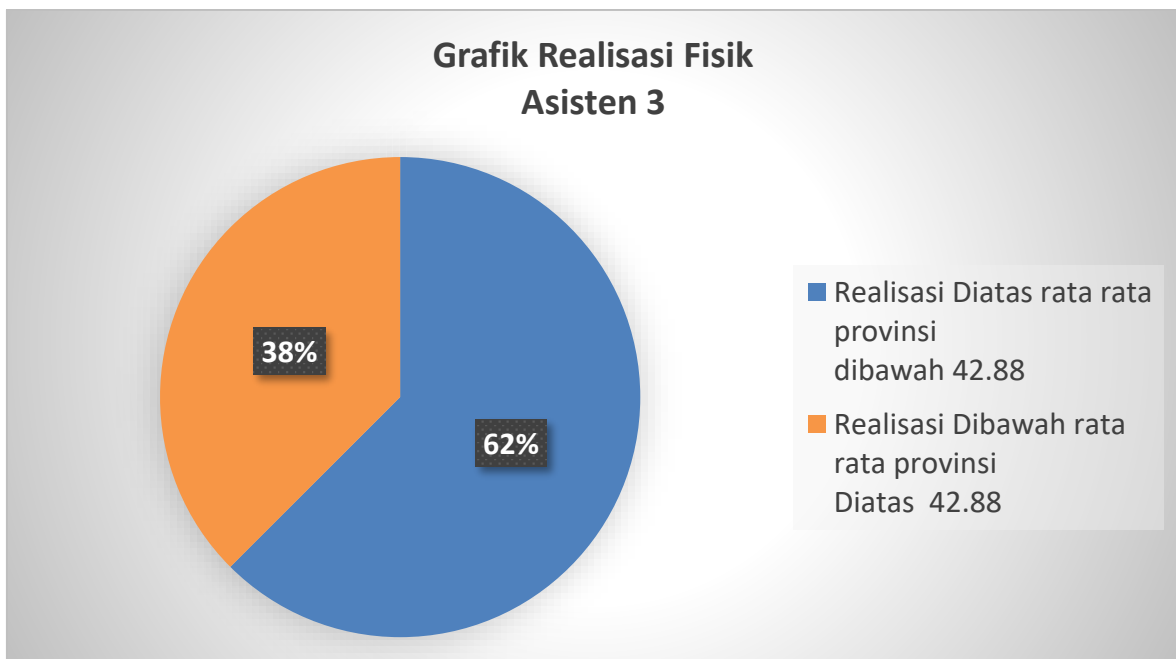
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Fisik			Keuangan		
	T	R	D	T	R	D
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	55.51	50.11	-5.40	55.45	50.40	-5.05
BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.83	32.74	-9.09	41.11	34.69	-6.42
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	55.55	50.91	-4.64	54.16	43.06	-11.10
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49.47	44.83	-4.64	44.03	41.89	-2.14
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	38.42	37.10	-1.32	28.03	23.23	-4.80
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58.05	52.50	-5.55	55.09	50.61	-4.48
BADAN PENGHUBUNG	31.22	35.22	4.00	29.86	28.76	-1.10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	56.22	54.93	-1.29	53.54	45.91	-7.63
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	69.11	31.89	-37.22	65.39	35.16	-30.23
BIRO ORGANISASI	51.54	50.85	-0.69	50.37	41.06	-9.31
BIRO UMUM	57.78	53.01	-4.77	57.18	47.05	-10.13
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	61.20	57.84	-3.36	60.50	54.06	-6.44
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	47.72	21.88	-25.84	47.29	21.98	-25.31
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	39.96	33.40	-6.56	32.61	23.38	-9.23
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	51.88	43.70	-8.18	51.88	41.34	-10.54
INSPEKTORAT	55.13	49.27	-5.86	51.35	46.72	-4.63
Rata - rata	51.29	43.76	-7.53	33.93	27.61	-6.32

NO	URAIAN	TARGE T (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	KET	RATA-RATA REALISASI PROVINSI (%)	KET
1	FISIK	51,29	43,76	-7,53	KURANG KONSISTEN	42,88	DIBAWAH RATA- RATA CAPAIAN PROVINSI
2	KEUANG AN	33,93	27,61	-6,32	KURANG KONSISTEN	32,98	DIBAWAH RATA- RATA CAPAIAN PROVINSI

Gambar 9. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 10. Diagram Perengkingan Realisasi Fisik Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023



Capaian realisasi fisik OPD lingkup Asisten Administrasi Umum yang berada diatas rata-rata provinsi (42,88%) adalah 10 (sepuluh) OPD, sedangkan realisasi yang berada di bawah rata-rata provinsi ada 6 (enam) OPD dengan keterangan sebagaimana tabel dibawah ini

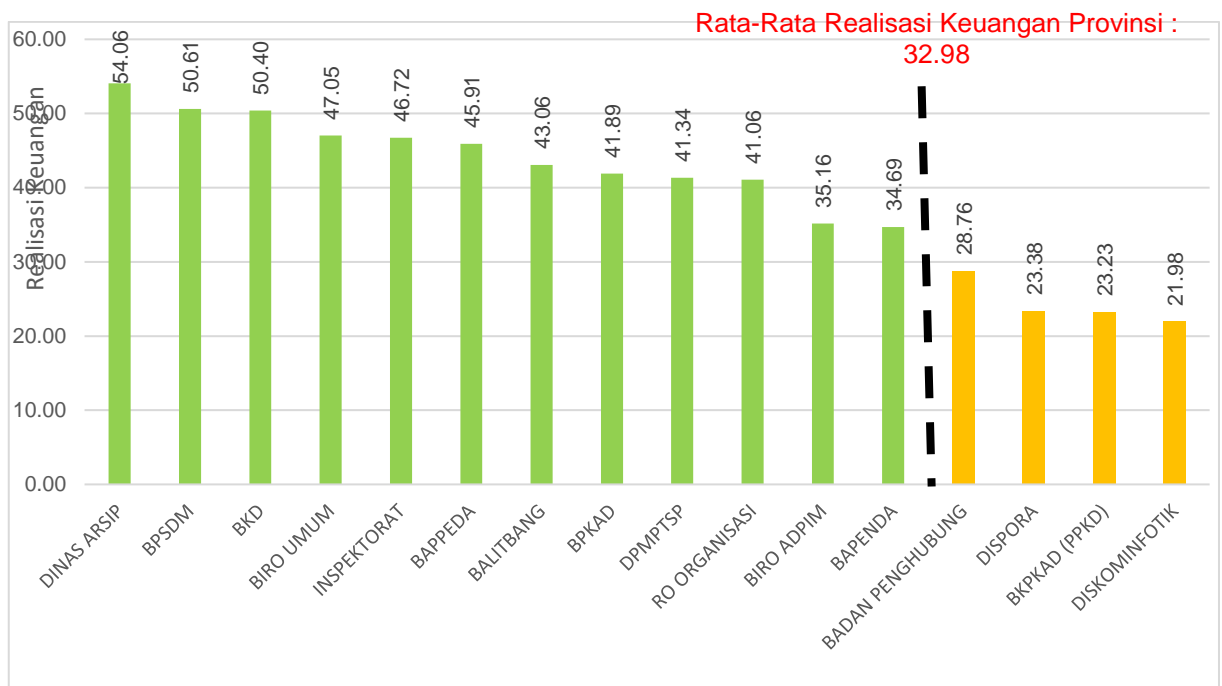
Data OPD Diatas rata rata provinsi : 42.88

No	OPD	Realisasi
1	DINAS ARSIP	57,84
2	BAPPEDA	54,98
3	BIRO UMUM	53,01
4	BPSDM	52,50
5	BALITBANG	50,91
6	RO ORGANISASI	50,85
7	BKD	50,17
8	INSPEKTORAT	49,27
9	DPMPSTP	45,28
10	BPKAD	44,83

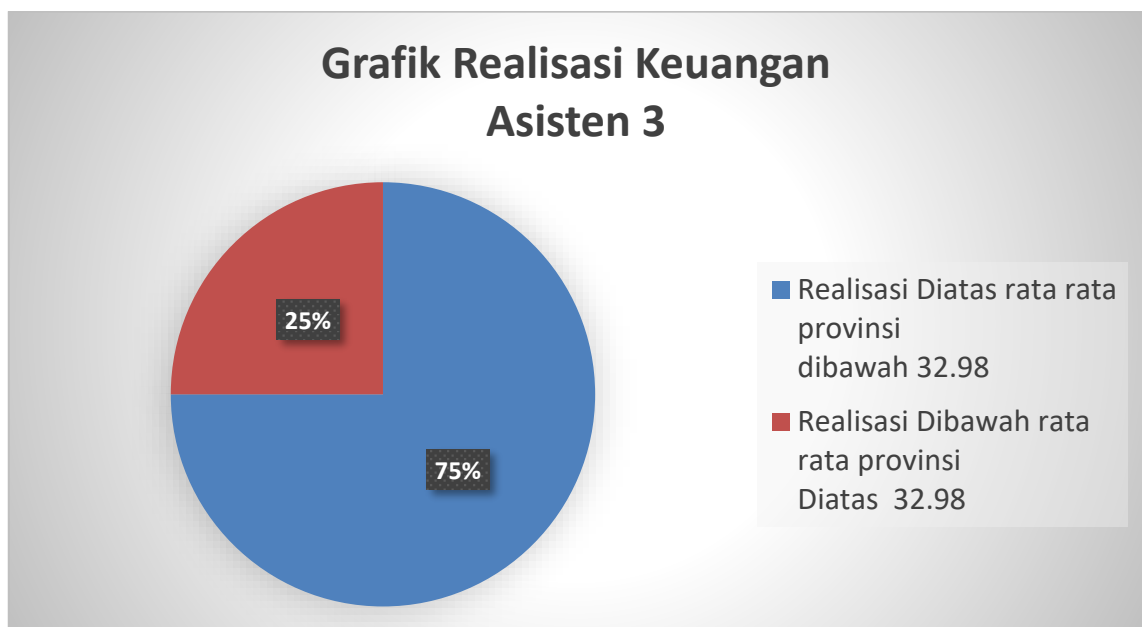
Data OPD dibawah rata rata provinsi : 42.88

No	OPD	Realisasi
1	BPKAD (PPKD)	37,10
2	BADAN PENGHUBUNG	36,12
3	DISPORA	33,40
4	BAPENDA	33,12
5	RO ADPIM	32,73
6	DISKOMINFOTIK	22,05

Gambar 11. Grafik Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023



Gambar 12. Diagram Perengkingan Realisasi Keuangan Tertinggi ke Terendah OPD Lingkup Asisten Administrasi Umum Kondisi 30 Juni 2023



Dari grafik diatas dapat dirinci bahwa realisasi keuangan Lingkup Asisten Administrasi Umum yang berada diatas rata-rata Provinsi adalah 12 (dua belas) OPD sedangkan yang berada di bawah rata-rata provinsi ada 4 (empat) OPD.

Data OPD Diatas rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	DINAS ARSIP	54,06
2	BPSDM	50,61
3	BKD	50,40
4	BIRO UMUM	47,05
5	INSPEKTORAT	46,72
6	BAPPEDA	45,91
7	BALITBANG	43,06
8	BPKAD	41,89
9	DPMPSTP	41,34
10	RO ORGANISASI	41,06
11	BAPENDA	35,60
12	RO ADPIM	35,43

Data OPD dibawah rata rata provinsi : 32.98

No	OPD	Realisasi
1	BADAN PENGHUBUNG	28,76
2	DISPORA	23,38
3	BKPKAD (PPKD)	23,23
4	DISKOMINFOTIK	21,98

Tabel 6. Konsistensi dan Inkonsistensi antara Target dengan Realisasi

NO	URAIAN	KONSISTEN	KURANG KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
1	REALISASI FISIK	1. DINAS ARSIP 2. BAPPEDA 3. BIRO UMUM 4. BPSDM 5. BIRO ORGANISASI 6. BKD 7. INSPEKTORAT 8. BPKAD 9. DPMPTSP 10. BALITBANG	11. BPKAD (PPKD) 12. DISPORA 13. BAPENDA	14. BADAN PENGHUBUNG 15. BIRO ADPIM 16. DISKOMINFOTIK -
2	REALISASI KEUANGAN	1. BADAN PENGHUBUNG 2. BPKAD 3. BPSDM 4. INSPEKTORAT 5. BPKAD (PPKD)	6. BKD 7. BAPENDA 8. DINAS ARSIP 9. BAPPEDA 10. DISPORA 11. BIRO ORGANISASI	12. BALITBANG 13. BIRO UMUM 14. BIRO ADPIM 15. DISKOMINFOTIK 16. DPMPTSP

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut di Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan secara umum dalam pelaksanaan program kegiatan adalah :

1. Beberapa OPD masih kekurangan SDM terutama tenaga Operator Komputer yang mengakibatkan lemahnya pemanfaatan Aplikasi yang sudah harus dilaksanakan terutama untuk Aplikasi Simbangda sehingga penyampaian eviden administrasi kegiatan terhambat, diharapkan Biro Organisasi kembali untuk mereviu anjab dan ABK masing-masing OPD untuk menjadi bahan bagi BKD dalam pengisian formasi.
2. Pengadaan Barang dan jasa masih belum optimal beberapa kegiatan masih dalam proses tender dan kontrak, mengingat sudah memasuki triwulan 3 dan awal semester, maka Biro PBJ mempercepat proses agar segera dapat direalisasikan.
3. Terdapat beberapa kegiatan akan mengalami perubahan/batal dan diusulkan di anggaran perubahan, setiap OPD agar mengusulkan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi hambatan d anggaran perubahan.
4. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD sesuai schedule karena menyesuaikan dengan agenda dari masing-masing anggota dewan, masing-masing OPD yang mendapat alokasi Pokok-Pokok pikiran dari DPRD agar meningkatkan koordinasi sebelum padatnya jadwal/kegiatan DPRD.
5. Tidak terlaksananya beberapa kali rapat Forkopimda sesuai schedule karena menyesuaikan dengan agenda pimpinan, meningkatkan koordinasi dengan pimpinan bagi pejabat penanggungjawab kegiatan
6. Adanya pergantian pimpinan yang mengakibatkan pergantian pejabat PA per Tanggal 26 Juni 2023 sehingga mengakibatkan beberapa SPJ tidak sepenuhnya bisa di realisasikan, telah di proses perubahan pejabat tersebut melalui SK Gubernur.

7. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan operasi penertiban sementara wilayah yang harus dikawal oleh Satpol PP sangat luas, Satpol PP akan memetakan wilayah yang menjadi kewenangannya dan mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut
8. Pada Biro Hukum Realisasi anggaran untuk melaksanakan fungsi layanan disesuaikan dengan kasus yang dilayani dan kebutuhan korban, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dipastikan, perlu dilakukan inventarisir kasus tahun berjalan untuk di alokasikan bantuan di tahun berikutnya.
9. Pada Dinas Pendidikan terkendala SSH baru yang berbeda dengan yang dulu paket /LS harus dirinci dan telah diperbaiki pada tahapan anggaran pergeseran
10. Harga pasar lebih tinggi dari DPA, ditindaklanjuti melalui anggaran pergeseran jika ada ketersediaan anggaran atau di Anggaran perubahan
11. Data Pokir belum valid dan akan diperbaiki di pergeseran
12. Kegiatan salah nomor rekening dilakukan perbaikan di pergeseran
13. Kurangnya alokasi gaji ASN dan PPPK, ditindaklanjuti oleh setiap OPD dengan menghitung ulang kebutuhan dan mengusulkan ke BPKAD sesuai dengan kebutuhan.
14. Penundaan beberapa kegiatan akibat kegiatan Penas Petani dan Nelayan sehingga beberapa kegiatan dialihkan ke akhir Juni atau bulan berikutnya, perubahan jadwal akan disesuaikan dengan jadwal Kepala Daerah terutama evev yang sangat penting.
15. Beberapa kegiatan termasuk dalam kegiatan DAU yang ditentukan sehingga proses pencairan akan terkendala, setiap OPD harus mencermati dan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pada DAU yang ditentukan sesuai dengan tahapan salurnya.
16. Pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait PIAK PD terdapat permasalahan yaitu Aktiviasi IKD versi IOS yang awalnya dijadwalkan “aktif” pada bulan maret, ternyata baru bisa diaktifkan pada bulan akhir juni 2023 karena proses di IOS itu sendiri, sehingga kegiatan evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh pusat menjadi tertunda segera dilakukan koordinasi ke Pusat.

17. Pada Dinas Kesehatan terdapat beberapa kegiatan pengadaan yang masih terkendala terkait harga sesuai dengan Perka Kemenkes adanya sisa dana dari Konsolidasi Kemenkes, tender gagal akibat tidak ada calon penyedia yang memenuhi syarat, akan mengkomunikasikannya dengan UKPBJ untuk pelaksanaan selanjutnya
18. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya deviasi pada Rumah Sakit Daerah Pariaman yang targetnya terlalu tinggi, target dinaikkan dari 75 menjadi 75% menjadi 86% tahun 2023 menjadi beban sebesar 29 M, meningkatnya pendapatan pada tahun 2021 karena adanya pandemi Covid 19, mengusulkan untuk menurunkan pendapatan RSUD.
19. Dalam memenuhi SPM di Dinas Sosial menyangkut dengan Panti sosial agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan terhadap 127 panti sosial.
20. Pembuatan aturan Tahapan fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Kemenkum HAM (Kanwil) dan Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu, selalu berkoordinasi untuk mempercepat progres harmonisasinya.
21. Adanya beberapa dokumen persyaratan pencairan hibah ke panti milik masyarakat yang belum dipenuhi maka akan dilakukan komunikasi langsung ke pengurus panti untuk segera melengkapi persyaratan; dan segera melakukan proses pencairan hibah bagi panti yang telah lengkap persyaratannya.

3.2. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut di Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Permasalahan secara umum dalam pelaksanaan program kegiatan adalah :

1. Paket Jasa Konsultansi Penelitian Publik (Aprissal) Proses seleksi tidak sesuai dengan aturan tersebut, yang menyatakan kalau proses bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, proses akan dilakukan dengan pengadaan langsung direncanakan pada Bulan Oktober ketika sudah penetapan lokasi.
2. Progres Fisik Kegiatan Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat sering rendah dan tidak sesuai dengan rencana, karena kemajuan progres bergantung pada peristiwa bencana alam, Pekerjaan Kegiatan Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat diarahkan juga untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan penanganan secepatnya untuk memulihkan arus lalu lintas yang

belum tertangani oleh UPTD Jalan/Jembatan

3. Terdapat Ruas Jalan Provinsi di Kab Pesisir Selatan (Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai) belum terhubung (konektif) dan sepanjang 15 meter belum diaspal dan masih adanya jembatan gantung, sehingga biaya mobilitas semakin tinggi, Pergantian jembatan gantung menjadi jembatan konvensional sehingga dapat dilakukan pengaspalan jalan.
4. Terkendalanya pengamanan badan jalan (pekerjaan pemasangan batu) karena sebagian masyarakat ada yang tidak bersedia (sepadan lahan). Perlu koordinasi dengan Walinagari dan Pemerintah setempat akan sosialisasi pemanfaatan ruang milik jalan tersebut
5. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar : Pekerjaan yang akan dilakukan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Diperlukan rekanan yang memiliki ahli yang sesuai dengan jenis item pekerjaan, seperti apa pekerjaan interior, mengatasi kebocoran pada lantai beton, pertamanan/landscape, pembersihan kaca, aluminium composite panel (ACP) dan plumbing.
6. Dengan pagu anggaran 1,5 M, kegiatan ini termasuk dalam segmentasi usaha kecil hanya bisa mensyaratkan paling banyak 1 SBU Untuk pemaketan usaha kecil hanya boleh ada pelaksana dan ahli /petugas K3 yang jumlahnya 1 (satu) orang perjabatan sehingga diperkirakan nantinya kurang memenuhi untuk pekerjaan yang itemnya banyak dan berbeda, akan merekrut tenaga sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Terdapat 7 paket tender dengan anggaran \pm Rp 5,779 milyar yang diajukan proses lelang pada bulan maret dan diumumkan pemenang pada tanggal 7 Juni 2023, perlu dipercepat progress pelaksanaannya.
8. Terdapat kendala proses pembayaran yang memakai sistim terbaru di SIPD TA 2023
9. Adanya beberapa alat labor yang berasal dari Luar Negeri (terkait TKDN), akan dilakukan koordinasi terkait dengan spesifikasi alat
10. Beberapa kegiatan yang terkendala seperti perubahan target, lokasi dan biaya akan dilakukan pergeseran/perubahan.

11. Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan dan mengusulkn ke BKD dan mengusulkan sapras di RKBMD.
12. Tidak ada nya sarana mengolah limbah medis di UPTD RSH, akan diajukan Insenerator (tempat pemusnah limbah medis) dan melakukan kerjasama/ MoU/Swakelola pembayaran dengan Rumah Sakit Umum/Swasta yang telah memiliki izin penggunaan Insenerator pada tempatnya.
13. Terkendalanya kegiatan bulan Juni pada seksi perkeretaapian dan seksi angkutan dengan bersamaan adanya pelaksanaan kegiatan latsitarda dan penastani, kegiatan akan segera ditindaklanjuti pada Bulan Juli.
14. Realsasi PAD pada UPTD K3 dikhawatirkan tidak akan dapat mencapai target yang ditetapkan dikarenakan anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pemeriksaan lingkungan kerja di perusahaan dan pemeriksaan kesehatan kerja bagi pekerja diperusahaan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran, telah dinaikan Nota penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini ke Gubernur dan telah diteruskan ke TAPD
15. Masih terdapatnya anggaran kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya yang bukan merupakan kewenangan di DPA Dinas ESDM yg nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi realisasi anggaran, telah menyampaikan surat ke TAPD agar anggaran tsb. Dapat segera dipindahkan/ ditarik dari DPA Dinas ESDM.
16. Beberapa OPD mengeluhkan kekurangan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, disarankan agar memaksimalkan penggunaan anggaran yg tersedia.
17. Pelaksanaan kegiatan terkendala karena tempat acara yang dilakukan di Hotel sering penuh, diupayakan untuk menggunakan aula/ruang rapat instansi pemerintah.
18. Kegiatan-kegiatan Pokir sering mengalami perubahan jadwal dan bahkan ada yang tidak terlaksana, meningkatkan koordinasi dengan pengusul dan jika tidak akan dilaksanakan agar diusulkan pada APBD Perubahan.
19. Kecendrungan rekanan konstruksi menawar rendah sehingga berpotensi kurang berkualitas dan putus kontrak, agar UKPBJ memperketat dengan menambah persyaratan dan direncanakan mengalihkan metode pemilihan ke E-Katalog sektor Konstruksi

20. Banyak revisi / perbaikan dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK ke UKPBJ. Perbaikan dokumen tersebut cenderung lama diperbaiki oleh PPK, sehingga waktu pengumuman tender di LPSE menjadi tertunda, hal ini disebabkan bantak KPA dan PPTK yang belum memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa, sesuai arahan Bapak Gubernur paling lambat 31 Desember 2023, PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi (pasal 88 Perpres 12/2021). BPSDM perlu segera menyelenggarakan pelatihan kompetensi PPK dalam rangka meningkatkan Kompetensi PPK dan memenuhi amanat pasal 88 Perpres 12/2021
21. Masih banyak paket pengadaan melalui tender yang masih berada di OPD dikawatirkan tidak mencukupi waktu pelaksanaannya, agar UKPBJ terus berupaya melakukan pendampingan ke OPD untuk segera melakukan proses pengadaan baik melalui Tender, e Katalog ataupun PL
22. Masa kepengurusan Forum TJSLP Provinsi Sumatera Barat yang akan berakhir tanggal 30 Desember 2023 sebagaimana yang ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 500-1020-2019, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Permensos Nomor 9 Tahun 2020, bahwa kepengurusan forum CSR tidak lagi secara ex officio, namun melalui mekanisme Munas (Pusat) dan Musda (Provinsi/Kabupaten/Kota), melakukan koordinasi lebih intens antara caretaker lintas OPD/instansi sesuai dengan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Nomor: 03. 07/Kep/00/V/2023 tentang Kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka untuk terbentuknya Musda di Provinsi Sumatera Barat.
23. Belum maksimalnya upaya OPD untuk merumuskan kebijakan dan kesepakatan bersama terkait dengan perencanaan perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan PT. Semen Padang tentang sinergitas progul dan program prioritas lainnya dengan CSR terutama pada Bidang Pendidikan dan kesehatan (stunting), OPD terkait harus bergerak aktif dan opensif dalam rangka menyakinkan PT. Semen Padang terhadap program-program bernas yang ditawarkan adalah kredible, sehingga tidak merusak citra pemerintah.

3.3. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut di Lingkup Asisten Administrasi Umum

Permasalahan secara umum dalam pelaksanaan program kegiatan adalah :

1. Adanya anggaran kegiatan pemeliharaan dan rehab-rehab yang terpotong, akan dilakukan perubahan anggaran dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim TAPD
2. Masih rendahnya indeks profesioniltas ASN yaitu 58%, hal ini sudah dapat sedikit teratasi dengan Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Peningkatan pemanfaatan Misbela sebagai media meningkatkan indeks profesionalitas ASN tersebut
3. Masih lemahnya pembinaan disiplin ASN, menyurati pimpinan OPD untuk melaksanakan pembinaan terhadap ASN yang ada dilingkungan OPD masing-masing, jika kepala OPD tidak melakukan pembinaan maka kepala OPD dapat menerima hukuman yang sama dengan ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tersebut.
4. Masih ada beberapa harga satuan pada Belanja barang belum sesuai dan belum terhimpun pada katalog lokal, segera disesuaikan nilai satuan pada pergeseran APBD, dan untuk etalase sudah selesai tahap Surat Keputusan Sekda, dalam waktu etalase barang cetakan khusus akan dibuka sehingga pemenuhan kebutuhan cetak blanko SKPD bisa direalisasikan bulan Juli 2023.
5. Kekurangan sumberdaya manusia di beberapa UPT sehingga terkendala dalam pelaksanaan kegiatan, mengusulkan kebutuhan penambahan PNS untuk ditempatkan di UPTS Samsat ke BKD sesuai Anjab dan ABK.
6. Terjadinya perubahan Lokasi pembuatan perekayasaan hidran pump dan akan dilakukan uji coba dahulu, seminar proposal belum jadidilakukan karena perubahan teknologi perekayasaan, serta bergabung kegiatan pengumuman lomba dengan temu karya panas tani sehingga anggaran honor tidak semua dapat direalisasikan, segera koordinasi dengan Tim Ahli untuk percepatan pelaksanaan seminar dan Percepatan survey lokasi kegiatan.

7. Keterlambatan dalam penyusunan produk hukum pada proses harmonisasi, karena menunggu jadwal pembahasan dari Kemenkumham, segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
8. Beberapa pengadaan terlambat akibat terlambat mengajukan proses dan spj pertanggungjawaban, tingkat control dan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara bertingkat.
9. Harga aturan sewa kendaraan untuk daerah DKI belum ditampung dalam Peraturan Gubernur SHS No, 37, setelah ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sewa kendaraan agar OPD mengusulkan satuan harga sesuai kebutuhan.
10. Beberapa kegiatan tertunda akibat penyesuaian jadwal Pimpinan, tetap berupaya meningkat koordinasi dengan Pimpinan dan protokoler .
11. Adanya beberapa rincian belanja pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan dilakukan perubahan rincian belanja pada Perubahan Anggaran 2023.
12. Masih terbatasnya masukan dan saran dari peserta terhadap rancangan awal RKPD 2024, Kepala OPD tidak hadir pada saat pembahasan, merubah system penerimaan masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga melalui online, kedepan pelaksanaan konsultasi publik dibuat per tema/prioritas pembangunan.
13. Tahapan pelaksanaan Musrenbang belum optimal terlaksana, karena usulan strategis belum optimal disampaikan ke Bappeda tetapi sudah dipetakan, Rancangan RKPD terlambat diterima, Dokumen RPJPD dan RPJMD yang sebagian besar bersifat kualitatif sehingga sulit diukur capaiannya.
14. Terbatasnya Personil/SDM serta kendaraan untuk memfasilitasi Pimpinan dan akan disusulkan kebutuhan sesuai ketersediaan anggaran.
15. Publikasi kegiatan pimpinan melalui media, Persoalan atau isu yang hadir ditengah-tengah masyarakat sering kali luput dari perhatian, sehingga publikasi yang kita sampaikan ke masyarakat akan sedikit menjadi konsumsi masyarakat, bahkan bisa jadi di hiraukan oleh masyarakat, perlu dilakukan pemetakan isu, terhadap semua pihak terkait atau pihak ke 3 agar proses penyiapan bahan publikasinya tidak terputus karena untuk menjawab itu

perlu arahan atau kebijakan kepala daerah, Saran, perlu komunikasi yang intens dengan pimpinan. (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda)

16. Terdapatnya beberapa perangkat daerah yang menyusun dokumen Anjab/ABK nya menggunakan Nomenklatur lama, sehingga format penghitungannya berbeda dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dari itu dokumen Anjab/ABKnya dikembalikan untuk diperbaiki kembali berdasarkan Nomenklatur terbaru, perlu dilakukan pendampingan dalam penyusunan anjab abk dan menerima konsultasi dari setiap OPD.
17. Penyiapan Naskah Sambutan Pimpinan minim informasi data terbatu, disrankan kepada OPD agar menyampaikan bahan beberapa hari sebelum hari H, agar dapat dipersipkan data dan informasi terkini yang akan disampaikan Pimpinan.
18. Terbatasnya ruang publikasi (media luar), baliho terutama disaat even daerah cukup banyak, perlu dilakukan pemetaan lokasi di kab/Kota untuk pemasangan tiang baliho dan penganggaran pembuatan tiang baliho.
19. Pengurusan Perizinan Keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian menjadi salah satu hambatan didalam pelaksanaan kegiatan dari karena panjang administrasi dan alur koordinasi yang harus dilalui didalam memperoleh izin keramaian kegiatan yang dilaksanakan
20. Perubahan Rincian dan Target Kegiatan dari Anggota Dewan Pemilik Pokir serta Jadwal pelaksanaannya sehingga administrasi keuangan tidak dapat terealisasi sesuai target.
21. Adanya perbedaan pendapat tentang implementasi form Pengawasan Kearsipan yang selalu berubah, Melakukan koordinasi dengan tim pengawas ANRI koordinasi dengan tim pengawasan kabupaten kota
22. Pelaksanaan fumigasi tidak terlaksana selama 5 tahun akibat keterbatasan anggaran sehingga dikhawatirkan arsip dimakan kecoa, dilakukan pergeseran anggaran pada perubahan tahun 2023 dari belanja modal lemari pada sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno menjadi Belanja Modal Peralatan untuk alihmedia dan Belanja Jasa Fumigasi pada Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

23. Proses pengadaan pekerjaan pembangunan Command Center di Ruang Pola Lt.3 Kantor Gubernur belum bisa dilaksanakan karena harus ada pengkajian teknis terlebih dahulu tentang kekuatan ruangan gedung dan bangunan untuk Command Center yang anggarannya masih terkendala atau masih dalam proses penyediaan, perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu dengan melakukan proses penyediaan anggaran dan atau upaya lainnya.
24. Kegiatan-kegiatan ke olahraga mengalami keterlambatan pelaksanaan karena disebabkan beberapa hal diantaranya sulitnya izin untuk mengadakan keramaian, Perubahan Rincian dan Target Kegiatan dari kegiatan Pokok Pokok Pikiran serta Jadwal pelaksanaannya sehingga administrasi keuangan tidak dapat terealisasi sesuai target, Pengurusan Perizinan dilaksanakan satu bulan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan Anggota Dewan Pemilik Pokir dan ASPROV PSSI Sumbar untuk pelaksanaan kejuaraan Nasional.
25. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang perizinan berusaha, dan belum pahamnya masyarakat tentang pengaduan perizinan dan non perizinan, masih banyak ditemukan perbedaan standar operation prosedur (SOP) antar Kab/ Kota, sehingga membuat bingung para pelaku untuk melakukan proses pengaduan, melakukan sosialisasi / bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan perizinan berusaha pada APBD Perubahan 2023 dan memperjelas SOP pengaduan perizinan berusaha.
26. Terlambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan di Inspektorat diantaranya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, saat ini masih berlangsung tahap evaluasi SPIP Terintegrasi sehingga realisasi keuangan/fisik terkait masih belum dapat dilaksanakan, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, saat ini masih melaksanakan Pendampingan ZI sehingga realisasi keuangan/fisik masih belum dapat dilaksanakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi masih belum banyak direalisasikan karena bergantung pada pelaksanaan Saber Pungli oleh Tim Saber Pungli. Dalam hal ini yang menjadi leading sektor adalah Polda Sumatera Barat, disarankan untuk segera mempercepat realisasi fisik dan Intensif melakukan koordinasi dengan Tim Saber Pungli Sumbar

BAB. IV

ANALISA CAPAIAN KINERJA

4.1. Analisa Capaian Kinerja Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berada diatas rata-rata provinsi (42,88%) adalah 12 (dua belas) OPD, sedangkan realisasi yang berada di bawah rata-rata provinsi ada 6 (enam) OPD artinya realisasi fisik cukup baik dan konsisten walaupun belum optimal hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan tidak tepat dalam menentukan aliran kas dan bobot pekerjaan sehingga tidak tercapai secara maksimal , penyebab lainnya adalah beberapa kegiatan termasuk pada kegiatan DAU yang ditentukan sehingga progresnya harus diikuti dengan rencana salur, masalah penjadwalan pada kegiatan Pokok-Pokok pikiran yang sering terkendala dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan jika koordinasi antar pihak terkait dapat lebih konsisten sehingga tidak bermasalah karena lembaga eksekutif pada awal-awal tahun anggaran lebih longgar ketersediaan waktunya.

Permasalahan kekurangan SDM dan anggaran dapat menjadi pertimbangannya OPD untuk membuat perencanaan tepat sasaran sesuai urgensinya, terutama untuk kebutuhan SDM, OPD harus menghitung Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, Masih ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan, dan progresnya lambat sehingga perlu percepatan terutama ketika prosesnya melalui Penyedia akan membutuhkan waktu untuk itu perlu KPA harus mampu memahami tahapan dari proses pengadaan.

4.2. Analisa Capaian Kinerja Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Di Lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan realisasi fisik dan keuangan masih rendah dan terdapat 9 OPD yang sudah berada diatas capaian rata-rata Provinsi (42,08%) sedangkan 9 OPD masih berada di bawah capaian Provinsi, hal ini terlihat karena di lingkup Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian , merupakan OPD-OPD yang memiliki anggaran cukup besar dan

sangat urgen dan berhubungan dengan pembangunan fisik secara langsung dan menyangkut pengadaan barang dan jasa yang jumlah cukup banyak dan anggaran cukup besar dan prosesnya harus melalui penyedia maka perlu konsistensi proses pelaksanaan kegiatan untuk percepatan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan dan segera mengusulkannya ke UKPBJ, dan dapat menyesuaikan kembali dalam proses pergeseran/perubahan anggaran jika memang tidak dapat dilaksanakan sesuai alirannya yang sudah direncanakan.

4.3. Analisa Capaian Kinerja Lingkup Asisten Administrasi Umum

Di lingkup Asisten Administrasi Umum terdapat 9 OPD realisasi fisiknya sudah berada diatas rata-rata provinsi dan 6 OPD berada dibawah rata - rata Provinsi dari capaian realisasi fisik dan keuangan dapat digambarkan bahwa secara umum capaian tersebut masih belum optimal karena beberapa hal diantaranya proses pengadministrasi dan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak teratur dan perlu ditingkatkan dan dalam proses penginputan di Simbagda belum maksimal karena banyak eviden dari pelaksanaan kegiatan tidak diinputkan atau terlambat sehingga membuat data yang ditampilkan dalam laporan belum optimal. Kekurang SDM dan sarana prasarana dapat dikoordinasi dengan instansi terkait agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dari Analisa terhadap Program/Kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan yang terkendala karena sulitnya penjadwalan pelaksanaan dengan pihak pengusul agar dikoordinasikan secara maksimal di awal - awal tahun.
2. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan tender dini untuk mempercepat proses pelaksanaan.
3. Kekurangan SDM bukan penghalang dalam pelaksanaan kegiatan, dengan menghitung kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK dan Anjab menjadi hal yang mutlak sehingga Badan Kepegawaian Daerah dapat menghitung formasi yang akan disediakan baik dengan perekrutan pegawai baru (PNS dan P3K), namun perlu diperhatikan juga bahwa penambahan tersebut akan menambah beban anggaran yang saat ini dalam kondisi tidak baik. Karena alokasi untuk gaji dan tunjangan masih belum terpenuhi di triwulan I, BKD diharapkan dapat mempertimbangkan untuk moratorium penerimaan pegawai dari Kab/Kota untuk sementara waktu.
4. Bagi kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana ditriwulan I agar mengikuti proses tahap perubahan anggaran dengan mempertimbangan target pencapaian sampai dengan kondisi Desember.
5. Mempercepat proses administrasi menyangkut aturan, produk hukum terkait pelaksanaan kegiatan.
6. Merencanakan realisasi anggaran dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan dan tidak hanya di terka berdasarkan kemungkinan tetapi disesuaikan dengan tahapan proses pekerjaan.
7. Agar laporan bulanan, Triwulan dan semester terekspose secara baik maka tertib administrasi menjadi faktor penentu dalam melihat realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelaporan semester II dan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengawal tahapan salur bagi Anggaran APBD yang termasuk dalam DAU yang ditentukan dan dalam mengontrol pengendalian juga memperhatikan tentang mitigasi resiko sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur tentang Manajemen Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

